



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, anugerah dan inayahNya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Diklat Industri Makassar tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Diklat Industri Makassar ini merupakan pedoman kerja dilingkungan BDI Makassar selama tahun 2024 maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja tahun 2024 Balai Diklat Industri Makassar dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan-masukan dalam perbaikan renstra ini. Akhir kata terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut membantu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini dan semoga dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan tugas dilingkungan BDI Makassar pada tahun 2024.

Makassar, 13 Januari 2024
Kelembagaan Balai Diklat Industri Makassar

Begus Herry, SE
NIP. 196605121990031005


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	7
C. Tugas Pokok dan Fungsi	9
D. Ruang Lingkup	11

BAB 2 PERKEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Hasil – hasil Pembangunan	13
B. Pembinaan	15
C. Arah Pembangunan Diklat	16

BAB 3 RENCANA KINERJA

A. Sasaran	24
B. Indikator Kinerja	27

BAB 4 PENUTUP

A. Penutup	28
------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian tersebut, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan industri baik di tingkat pusat maupun daerah. RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan:

1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;

3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. melakukan pembangunan industri hijau;
9. melakukan pembangunan industri strategis;
10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2020-2024)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri nasional dilakukan program pengembangan industri prioritas yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta. Program pengembangan industri prioritas (industri pangan) disusun untuk periode 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan;
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;
4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;
5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;
6. Memfasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil;
7. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;
8. Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor;

9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.

Program pengembangan industri prioritas untuk industri agro disusun untuk periode 2015-2019 yang masuk pada tahap I pembangunan nasional Indonesia yakni:

1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai;
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui pendidikan dan pelatihan industri;
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;
4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan, dan furnitur, serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
5. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;
6. Mengoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk;
7. Memfasilitasi penerapan harga keekonomian produk bioenergi;
8. Memberikan insentif khusus untuk industri bioenergi;
9. Memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar negeri;
10. Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan POME (Palm Oil Mill Effluent) terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit untuk mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca), dan mendorong penerapan industri hijau pada industri pulp dan kertas.

Sektor agroindustri akan menjadi fokus pengembangan industri di Indonesia. Agroindustri merupakan kegiatan industri yang memanfaatkan hasil sumber daya pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. sektor agroindustri sebagai *leading sector*, karena menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, mampu memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di pasaran global, dapat menampung

tenaga kerja sederhana dalam jumlah besar, dan sangat beragam variasi produknya sehingga berpeluang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, serta dapat meningkatkan cadangan devisa negara.

Selanjutnya, pengembangan agroindustri akan sangat strategis apabila dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backward and forward linkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsepsi berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumberdaya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek. Dengan demikian diperlukan jaringan kerja dan peran aktif semua pihak yang terkait. Keterpaduan dan berkelanjutan inilah yang menempatkan IKM yang tergabung dalam sentra-sentra, menjadi variabel penting. Hal ini karena agroindustri, yang memproduksi kebutuhan konsumsi masyarakat memiliki *multiplier effects* tinggi karena keterlibatan berbagai komponen dalam masyarakat.

Balai Diklat Industri Makassar merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan di sektor industri yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan dunia usaha. Dengan adanya otonomi daerah, maka tupoksi tersebut ternyata banyak menghadapi berbagai kendala di dalam melaksanakan tugas pokoknya. Agar UPT diklat yang ada di Kementerian Perindustrian lebih eksis di masa yang akan datang, maka perlu di arahkan ke spesialisasi sesuai dengan kondisi wilayah kerja masing-masing BDI. Khusus untuk BDI Makassar, yang mempunyai potensi dan spesialisasi dibidang pengolahan rumput laut, kakao dan desain kemasan

Berkenaan dengan kesadaan diatas maka makin perlu ditanamkan kesadaran bahwa program pelatihan sumber daya manusia Indonesia mutlak diperlukan, meskipun merupakan investasi yang cukup mahal. Program pengembangan Sumber daya manusia merupakan suatu kekuatan yang diharapkan dapat menciptakan nuansa baru dalam upaya mempercepat pembinaan sumber daya manusia dengan kompetensi, kemampuan dan tingkat profesionalisme yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pembangunan sesuai dengan program pengembangan pada RIPIN

2015-2035 yakni menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui pendidikan dan pelatihan industri;

B. Maksud dan Tujuan

Balai Diklat Industri Makassar sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2023 berkewajiban untuk mendidik dan melatih Sumber Daya Manusia industri/dunia usaha dan Aparatur untuk menjadi tenaga profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan. Balai Diklat Industri Makassar diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga akan dapat memberikan kontribusi penyelesaian masalah tersebut diatas, baik langsung maupun tidak langsung.

Dilihat dari tanggungjawab morilnya Balai Diklat Industri Makassar saat ini yang ditugaskan untuk melaksanakan diklat-diklat Sumber Dayan Manusia dengan spesialisasi kompetensi dibidang pengolahan rumput laut, kakao dan desain kemasan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran strategis Balai Diklat Industri Makassar sebagaimana tergambar diatas tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya perumusan tujuan dan sasaran yang jelas serta langkah-langkah sistematis untuk mencapainya. Oleh karena itu di dalam Roadmap Balai Diklat Industri Makassar tahun 2020 dan Rencana Strategis Balai Diklat Industri Makassar telah diupayakan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 – 2024, tujuan yang ingin dicapai tersebut adalah :

- a. Meningkatkan kualitas sistem dan penyelenggaraan Diklat berbasis spesialisasi dan kompetensi bagi SDM industri.
- b. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana diklat di Balai Diklat Industri Makassar
- c. Menyiapkan SDM industri yang siap kerja, kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan spesialisasi dan kompetensi.
- d. Menjalin dan meningkatkan kerjasama atau promosi ke pihak yang terkait

Adapun sasaran Balai Diklat Industri Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya sistem dan penyelenggaraan Diklat berbasis spesialisasi dan kompetensi yang berkualitas bagi SDM industri
- b. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan spesialisasi kompetensi dan diluar spesialisasi kompetensi di Balai Diklat Industri Makassar
- c. Tersedianya SDM industri yang siap kerja, kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan spesialisasi dan kompetensi
- d. Terwujudnya kerjasama yang intensif antara BDI Makassar dengan pihak yang terkait.

Tujuan yang ingin dicapai Balai Diklat Industri Makassar sebagaimana yang dikemukakan diatas pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terus dilaksanakan dengan berbagai langkah penyempurnaan. Agar implementasi dilapangan tidak keluar dari jalur yang sesungguhnya harus dilalui, ditetapkan pula kebijakan operasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan program yang merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan.

Segegap jajaran Balai Diklat Industri Makassar harus memiliki komitmen yang kuat untuk mempedomani berbagai kebijakan dalam pelaksanaan program seperti kesamaan pandang bahwa sangatlah penting untuk meningkatkan kompetensi dalam lingkungan kerja yang kondusif, memperkuat kerja internal eksternal.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Balai Diklat Industri Makassar ke depan dapat dipertimbangkan untuk melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan SDM Industri Berbasis Kompetensi (3 in 1)
2. Inkubator Bisnis
3. Pengembangan SDM BDI Makassar
4. Pengembangan Kurikulum dan Modul
5. LSP dan TUK
6. Strategi Promosi

7. Monitoring & Evaluasi program/kegiatan
8. Pengadaan sarana dan prasarana lembaga
9. Gaji dan Tunjangan
10. Operasional dan pemeliharaan kantor

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Diklat Industri Makassar adalah satuan kerja di bawah koordinasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Perindustrian, dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014, tanggal 26 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Diklat Industri yang menerangkan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri yang berbunyi:

1. Tugas (Pasal 2) :

Balai Diklat mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri yang mana Balai Diklat Industri Makassar memiliki fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri meliputi pengolahan rumput laut, kakao dan rumah kemasan.

2. Fungsi (Pasal 3):

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Diklat Industri Makassar menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri.
- b. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pembina industri.
- c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha industri kecil dan industri menengah yang berbasis spesialisasi dan kompetensi.
- d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri.
- e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri menengah.
- f. Pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri.

- g. Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri.
- h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan industri.
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha balai diklat industri.

3. Susunan Organisasi

Dalam rangka untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka susunan Organisasi BDI Makassar terdiri dari:

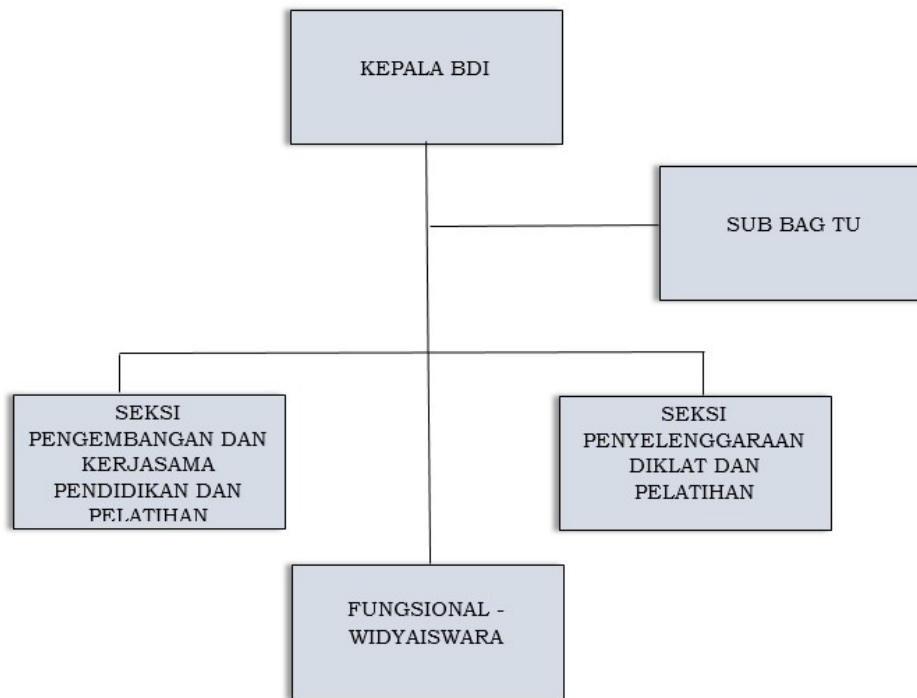
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Seksi Pengembangan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari masing- masing koordinator Sub. Bagian Tata Usaha dan Seksi- Seksi adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja, keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri.
- b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi, penyelenggaraan incubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- c. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan *workshop/teaching factory/incubator* bisnis.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

Bagan Organisasi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Gambar I. 1. Struktur Organisasi BDI Makassar

D. Ruang Lingkup

Rencana kerja tahun 2024 yang mengacu pada Renstra dan DIPA tahun 2024 yang berisi rincian kegiatan yang akan dilaksanakan Balai Diklat Industri Makassar pada tahun 2024 yang meliputi: Menyelenggarakan Kerja Sama Pendidikan Non Formal dengan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Lembaga Non-Pendidikan, Menyelenggarakan Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri, Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Rumput Laut, Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Kakao, Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Kemasan, Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Furniture, Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi

Calon Tenaga Kerja Industri, Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi), Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran, Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, Pengelolaan kepegawaian, Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan, Arahnya adalah tercapainya sasaran tahunan sebagai tahapan dari rencana strategi Balai Diklat Industri Makassar.

BAB II PERKEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Hasil-hasil Pembangunan

1. Operasional

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup bervariasi, hal ini sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan kondisi serta keuangan yang ada, dimana hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Aparatur dan Dunia Usaha selama kurun waktu tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I. Rencana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pada Balai Diklat Industri Makassar tahun 2019

No	Diklat Tahun 2019	Target	Realisasi
1	Diklat Pembuatan AO Ikan	31 Angkatan	1550 Orang
2	Diklat Pembuatan AO Rumput Laut	17 Angkatan	850 Orang
3	Diklat Finishing Furniture	5 Angkatan	250 Orang
4	Diklat Pembuatan AO Cokelat	14 Angkatan	700 Orang
5	Diklat Pembuatan Desain Kemasan	21 Angkatan	1050 Orang
6	Diklat Pengolahan Ikan Tuna Segar Beku	8 Angkatan	400 Orang
7	Diklat Pengolahan Rumput Laut	1 Angkatan	50 Orang
8	Diklat Pengoperasian Mesin Pengolahan Kakao	3 Angkatan	150 Orang
9	Inkubator Bisnis	8 Tenant	8 Orang

Tabel II. Rencana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pada Balai Diklat Industri Makassar tahun 2020

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Diklat Pembuatan AO Ikan	5 Angkatan	255 Orang
2	Diklat Pembuatan AO Rumput Laut	7 Angkatan	370 Orang
3	Diklat Pembuatan AO Cokelat	5 Angkatan	255 Orang
4	Diklat Pembuatan Desain Kemasan	7 Angkatan	375 Orang
5	Diklat Pengoperasian Mesin Pengolahan Kakao	1 Angkatan	45 Orang
6	Inkubator Bisnis	7 Tenant	7 Orang

Tabel III. Rencana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pada Balai Diklat Industri Makassar tahun 2021

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Diklat Pembuatan AO Ikan	9 Angkatan	650 Orang
2	Diklat Pembuatan AO Rumput Laut	6 Angkatan	450 Orang
3	Diklat Pembuatan AO Cokelat	6 Angkatan	430 Orang
4	Diklat Pembuatan Desain Kemasan	11 Angkatan	775 Orang
5	Diklat Pengolahan Ikan Tuna Segar Beku	3 Angkatan	225 Orang
6	Diklat Pengolahan dan Penyajian Kopi Barista	9 Angkatan	625 Orang
7	Inkubator Bisnis	9 Tenant	9 Orang

Tabel IV. Rencana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pada Balai Diklat Industri Makassar tahun 2022

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Diklat Pembuatan AO Ikan	12 Angkatan	765 Orang
2	Diklat Pembuatan AO Rumput Laut	7 Angkatan	390 Orang
3	Diklat Pembuatan AO Cokelat	6 Angkatan	410 Orang
4	Diklat Pembuatan Desain Kemasan	13 Angkatan	905 Orang
5	Diklat Pengolahan Ikan Tuna Segar Beku	7 Angkatan	500 Orang
6	Diklat Pengolahan dan Penyajian Kopi Barista	17 Angkatan	1240 Orang
7	Inkubator Bisnis	10 Tenant	10 Orang

Tabel V. Rencana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pada Balai Diklat Industri Makassar tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Diklat Pembuatan AO Ikan	50 Angkatan	2500 Orang
2	Diklat Pembuatan AO Rumput Laut	7 Angkatan	400 Orang
3	Diklat Pembuatan AO Cokelat	19 Angkatan	950 Orang
4	Diklat Pembuatan Desain Kemasan	7 Angkatan	350 Orang
5	Diklat Pengolahan Ikan Tuna Segar Beku	2 Angkatan	125 Orang
6	Diklat Pengolahan dan Penyajian Kopi Barista	17 Angkatan	860 Orang
7	Diklat Penyelia Halal	1 Angkatan	20 Orang
8	Diklat Penyangraian Kopi Biji	1 Angkatan	50 Orang
7	Inkubator Bisnis	10 Tenant	10 Orang

Melihat tabel hasil - hasil perkembangan diklat aparatur dan dunia usaha tahun 2019 – 2023 dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi disektor industri, serta semakin meningkatnya kesadaran para peserta khususnya dunia usaha industri akan manfaat pelatihan bagi pengembangan usahanya.

2. Pembinaan

Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar dalam hal ini kegiatan penyelenggaraan diklat senantiasa diadakan peningkatan-peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap sumber daya yang dimiliki yakni :

a. Aspek Kepegawaian

Peningkatan aspek kepegawaian dimaksud adalah untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga diharapkan dapat menghadapi tantangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang industri.

Berkaitan dengan hal tersebut kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bidang industri antara lain :

- Mengikutsertakan pegawai dalam berbagai kegiatan diklat, seminar, workshop dan lain-lain.
- Mengusulkan kenaikan pangkat, gaji berkala bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan secara tepat waktu.
- Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pendidikan formal kejenjang setingkat lebih tinggi
- Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

b. Aspek sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana mempunyai peran yang cukup penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dimana dengan melalui anggaran rutin maupun pembangunan telah diupayakan

peningkatan-peningkatan dengan maksud untuk menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang memadai/siap pakai.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Balai Diklat Industri Makassar tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Daya Saing SDM Industri
 - Jumlah tenaga kerja industri yang memiliki sertifikat kompetensi dan bekerja sebanyak 2500 Orang
 - Jumlah diklat yang diselenggarakan berdasarkan kurikulum dan modul berbasis SKKNI sebanyak 50 diklat
 - Jumlah diklat yang dapat disertifikasi sebanyak 50 diklat
 - Jumlah kurikulum yang link and match dengan industri sebanyak 7 kurikulum
- c. Meningkatkan networking
 - Jumlah perusahaan yang menerima penempatan kerja 20 ikm/perusahaan
- d. Meningkatkan utilitas sarana dan prasarana
 - Utilitas sarana dan prasarana penunjang diklat 2500 orang
- e. Meningkatkan kapabilitas pegawai BDI
 - Seluruh pegawai yang bekerja sesuai dengan kompetensinya
 - Jumlah widyaiswara/instruktur yang memiliki publikasi/pembuatan GBPP/SAP/Buku pedoman/Bahan Ajar/karya ilmiah, dll sebanyak 8 orang
 - jumlah rata-rata prestasi pegawai sebanyak 81
 - Seluruh pegawai yang bekerja 7 jam 30 menit/hari kerja
- f. Meningkatkan budaya organisasi
 - Pegawai yang menerima teguran/SP/hukuman disiplin maksimal 1 orang
- g. Meningkatkan akuntabilitas
 - Nilai SAKIP BDI Makassar adalah B
 - Nilai SPIP adalah B

2 Arah Pembangunan Diklat

Peningkatan produktifitas dan daya saing industri nasional tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Peran pemerintah sangat

diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri dan menghindari kemungkinan kecenderungan deindustrialisasi. Keseimbangan antara peran pemerintah dan kekuatan internal industri menjadi kekuatan dasar pengungkit akselerasi pertumbuhan industri nasional dalam kerangka penguatan daya saing di pasar global maupun di pasar domestik. Dari banyak kebijakan pemerintah berkaitan dengan sektor industri, RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional akan banyak berperan dalam menentukan perkembangan sektor industri di masa depan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian tersebut, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan industri baik di tingkat pusat maupun daerah. RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan:

1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;

7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. melakukan pembangunan industri hijau;
9. melakukan pembangunan industri strategis;
10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Penetapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2020-2024)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri nasional dilakukan program pengembangan industri prioritas yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta. Program pengembangan industri prioritas (industri pangan) disusun untuk periode 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan;
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;
4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;
5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;
6. Memfasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil;
7. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;
8. Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor;
9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.

Program pengembangan industri prioritas untuk industri agro disusun untuk periode 2015-2019 yang masuk pada tahap I pembangunan nasional Indonesia yakni:

1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai;
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui pendidikan dan pelatihan industri;

3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;
4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan, dan furnitur, serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
5. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;
6. Mengoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk;
7. Memfasilitasi penerapan harga keekonomian produk bioenergi;
8. Memberikan insentif khusus untuk industri bioenergi;
9. Memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar negeri;
10. Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan POME (Palm Oil Mill Effluent) terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit untuk mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca), dan mendorong penerapan industri hijau pada industri pulp dan kertas.

Industri berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah suatu produk karena mampu mengubah suatu produk mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi yang mempunyai nilai ekonomi dan daya guna yang lebih tinggi. Industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Pengembangan IKM perlu mendapat perhatian yang besar dari pemerintah dan masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya IKM. Pengembangan IKM hendaknya menggabungkan keunggulan dan kearifan lokal dan peluang pasar global, yang disinergikan dengan era otonomi daerah dan pasar bebas. Dengan adanya upaya tersebut, pengembangan IKM akan memperkuat struktur ekonomi nasional dan

daerah sehingga IKM akan berkiprah lebih besar lagi terhadap perekonomian nasional.

Sektor agroindustri akan menjadi fokus pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) nasional. Agroindustri merupakan kegiatan industri yang memanfaatkan hasil sumber daya pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Kegiatan pengembangan agroindustri dalam pembangunan ekonomi nasional pada PJP II telah menjadikan sektor agroindustri sebagai *leading sector*, karena menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, mampu memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di pasaran global, dapat menampung tenaga kerja sederhana dalam jumlah besar, dan sangat beragam variasi produknya sehingga berpeluang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, serta dapat meningkatkan cadangan devisa negara.

Selanjutnya, pengembangan agroindustri akan sangat strategis apabila dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backward and forward linkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsepsi berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumberdaya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek. Dengan demikian diperlukan jaringan kerja dan peran aktif semua pihak yang terkait. Keterpaduan dan berkelanjutan inilah yang menempatkan IKM yang tergabung dalam sentra-sentra, menjadi variabel penting. Hal ini karena agroindustri, yang memproduksi kebutuhan konsumsi masyarakat memiliki *multiplier effects* tinggi karena keterlibatan berbagai komponen dalam masyarakat.

Balai Diklat Industri Makassar merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan di sektor industri yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM Industri dengan spesialisasi kompetensi sesuai dengan kondisi wilayah kerja masing-

masing BDI. Khusus untuk BDI Makassar spesialisasi dan kompetensinya yakni pengolahan rumput laut, kakao dan desain kemasan.

Pembangunan sektor industri merupakan tulang punggung/ujung tombak bagi pembangunan ekonomi nasional, salah satu kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor industri adalah relative rendah produktifitas, profesionalisme serta terbatasnya penguasaan teknologi sumber daya manusia dibidang industri, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan daya saing sumber daya manusia Industri di era persaingan global ini diperlukan upaya dalam komitmen komponen masyarakat, lembaga pendidikan dan pelatihan baik pemerintah maupun swasta untuk bersama-sama secara sinergi meningkatkan SDM industri Indonesia.

Sejalan dengan kondisi tersebut dalam upaya menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut maka arah pembangunan pendidikan dan pelatihan aparatur dan dunia usaha ditujukan pada Terwujudnya peningkatan daya saing sumber daya manusia industri yang diupayakan melalui :

1. Pengembangan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas
2. Pengembangan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas
3. Pengembangan inovasi, kreatifitas dan etos kerja sumber daya manusia

Upaya untuk dapat merealisasikan hal-hal tersebut, langkah yang dapat ditempuh antara lain :

- a. Menyelenggarakan penyusunan dan pengembangan kurikulum dan modul
- b. Menyelenggarakan diklat sesuai dengan spesialisasi kompetensi (rumput laut, kakao dan kemasan)
- c. Meningkatkan kerjasama dengan instansi/lembaga/pihak terkait dengan dalam penyelenggaraan diklat.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang yang memadai/siap pakai
- e. Menyelenggarakan Monitoring pasca diklat dalam rangka peningkatan kualitas diklat yang diselenggarakan di BDI Makassar.

BAB III RENCANA KINERJA

A. Sasaran

Sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan dibidang pendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan dan memahami kekuatan dan kelemahan yang ada untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar yang melaksanakan diklat SDM Industri, maka perlu didukung program operasional, program pembinaan, dan program pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana diklat. Adapun sasaran kinerja BDI Makassar sebagai berikut:

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Balai Diklat Industri Makassar untuk periode tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

- Sasaran Strategis I. Meningkatnya Tenaga Kerja Industri yang kompeten

Indikator Kinerja

- a. Jumlah Tenaga Kerja Industri yang mengikuti Diklat sistem 3 in 1
- b. Jumlah Wirausaha baru melalui program inkubasi bisnis

Rencana kerja:

- Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 In 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri Rumput Laut, kakao, kemasan dan barista
- Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 In 1 (pelatihan, Sertifikasi, Dan Kompetensi)

B. Sasaran Strategis Perspektif Proses Bisnis Internal

- Sasaran Stategis I. Meningkatnya pelatihan berbasis kompetensi

Indikator Kinerja

- b. Jumlah mitra industri yang melakukan kerjasama program dan penempatan alumni
- c. Tingkat kepuasan pelanggan eksternal

Rencana kerja:

- Menyusun Modul Berbasis Kompetensi
- Relisensi LSP BDI Makassar
- Membentuk TUK Sektor Industri
- Menyelenggarakan Uji Kompetensi Sektor Industri
- Penyusunan Profil BDI Makassar
- Pengelolaan Website

C. Sasaran Strategis Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi

- Sasaran Strategis I. Terwujudnya ASN Satuan Kerja yang profesional dan berkepribadian serta birokrasi yang efektif

Indikator Kinerja

- a. Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Satuan Kerja unit pendidikan
- b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Satuan Kerja

Rencana Teknis:

- Pemeliharaan kendaraan operasional BDI Makassar
- Pengelolaan listrik, telepon dan jaringan
- Pengelolaan keamanan dan kebersihan
- Operasional dan pimpinan
- Pemeliharaan peralatan kantor dan pendidikan
- Menyusun Dokumen Perencanaan
- Menyusun Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan
- Menyusun Administrasi Bmn Dan Tata Kelola Arsip
- Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Dan Manajemen Kinerja
- Membangun/merenovasi Gedung/bangunan Perkantoran
- Melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Widyaiswara Dan Instruktur
- Membayarkan gaji dan Tunjangan Pegawai

Berdasarkan arah dan sasaran tersebut dan sesuai dengan usulan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2024, maka disusun rencana kerja Balai Diklat Industri Makassar tahun anggaran 2024 sebagai berikut

- a. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan**
 - ***Menyelenggarakan Kerja Sama Pendidikan Non Formal Dengan Lembaga Pendidikan Non Formal Dan Lembaga Non-pendidikan***
 - a. Revisi Skema Diklat Pembuatan Aneka Olahan berbasis Cokelat
 - b. Revisi Modul Diklat Pembuatan Aneka Olahan berbasis Cokelat
- b. Fasilitasi Dan Pembinaan Masyarakat**
 - ***Menyelenggarakan Inkubator Bisnis Untuk Pembentukan Wirausaha Industri***
 - a. Inkubator Bisnis
- c. Pelatihan Bidang Industri**
 - ***Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 In 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri Rumput Laut***
 - a. Diklat Pembuatan Aneka Olahan Berbasis Rumput Laut
 - b. Diklat Pembuatan Aneka Olahan Berbasis Ikan
 - ***Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 In 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri Kakao***
 - a. Diklat Aneka Olahan Cokelat
 - b. Diklat Pengolahan Dan Penyajian Kopi Barista
 - c. Diklat Penyangraian Kopi Biji
 - ***Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 In 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri Kemasan***
 - a. Diklat Desain Kemasan
 - ***Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 In 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri***
 - a. Diklat Penyelia Halal
 - ***Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 In 1 (pelatihan, Sertifikasi, Dan Kompetensi)***
 - a. Monitoring Dan Evaluasi Diklat 3 In 1
- d. Layanan Perkantoran**
 - ***Gaji Dan Tunjangan***
 - a. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan
 - ***Operasional Dan Pemeliharaan Kantor***
 - a. Operasional Perkantoran Dan Pimpinan
 - b. Pemeliharaan Gedung Kantor, Asrama Dan Workshop
 - c. Pemeliharaan Kendaraan Operasional
 - d. Pemeliharaan Peralatan Kantor Dan Peralatan Pendidikan
 - e. Pengelolaan Keamanan Dan Kebersihan
 - f. Pengelolaan Keamanan Dan Kebersihan
- e. Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal**
 - ***Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran***

- a. Penyusunan Program Dan Rencana Kerja
- b. Penyusunan Rencana Penggunaan Workshop Industri
- ***Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan***
 - a. Penyusunan Dan Administrasi Simak Bmn
 - b. Penyusunan dan Administrasi Laporan Keuangan
- ***Pengelolaan Kepegawaian***
 - a. Administrasi Kepegawaian
 - b. Keikutsertaan Diklat/sosialisasi/seminar/workshop/pameran Dll
 - c. Administrasi Arsiparis
- ***Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga Dan Perlengkapan***
 - a. Penyusunan Profil Bdi Makassar
 - b. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (pipk)
 - c. Operasional Lsp Dan Tuk Bdi Makassar
 - d. Relisensi Lsp P1 Bdi Makassar
 - e. Pengembangan SMM ISO 9001:2015
 - f. Pembangunan Zona Integritas

B. Indikator Kinerja.

Indikator kinerja adalah merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan sejauhmana tingkat pencapaian suatu sasaran/tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan faktor, masukan, luaran, hasil, manfaat dan dampak.

Untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri Makassar tahun 2024, telah disusun Indikator kinerja pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah Tenaga Kerja Industri yang mengikuti Diklat sistem 3 in 1 sebanyak 2150 orang
2. Jumlah Wirausaha baru melalui program inkubasi bisnis 10 orang
3. Jumlah mitra industri yang melakukan kerjasama program dan penempatan alumni sebanyak 49 dokumen kerjasama
4. Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Satuan Kerja unit pendidikan dengan nilai indeks prestasi rata-rata 76.
5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Satuan Kerja dengan nilai BB.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana kinerja ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan Balai Diklat Industri Makassar dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Rencana kinerja seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan Balai Diklat Industri Makassar tahun 2024 ini berpedoman pada Rencana Strategi Balai Diklat Industri Makassar, hal ini dimaksudkan untuk melihat deviasi pencapaian sasaran yang sesuai perkembangan lingkungan strategi dan faktor-faktor yang berpengaruh lainnya seperti ketersediaan anggaran, sehingga diharapkan dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya

Dengan rencana kinerja ini dapat dilihat apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana indikator kinerja setiap kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai sesuai rencana.